
AJARAN SOSIAL GEREJA TENTANG MEMBANGUN KELUHURAN MARTABAT MANUSIA SEBAGAI CITRA ALLAH

Vinsensius Bawa Toron, Yohanes Marinus

STP REINHA Waibalun Larantuka Flores Timur Indonesia
Email: toronvinsen4@gmail.com; hermaniacarola@yahoo.co.id

Abstrak

Berbagai macam kebijakan dan program harus berakar kuat pada keyakinan kita kepada Tuhan dan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Pemberdayaan yang melibatkan ibadah bermakna jika diarahkan pada kesejahteraan manusia sebagai makhluk Tuhan yang sama. Ajaran sosial Gereja yang dimuat dalam ensiklik menekankan bahwa proses pemberdayaan tidak membuat mereka mempunyai sikap ketergantungan terhadap kekuasaan ekonomi atau pemerintahan yang berskala besar, namun melepaskan mereka dari ketergantungan. Oleh karena itu, ensiklik tersebut memuat bahwa komisi PSE harus mengembangkan keterampilan dan potensi masyarakat sehingga mampu menciptakan usaha ekonomi yang mandiri dan komisi PSE harus mengendalikan arah kebijakan publik di bidang ekonomi atau politik dalam rangka memperkuat kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*). Komisi PSE harus mampu mendorong pembuat dan pelaku kebijakan publik untuk bekerja jujur, adil, dan peduli pada kepentingan bersama. Menciptakan pemasaran jaringan dan bisnis mikro yang melatih dan menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang kurang terampil. Tindakan ini perlu dikembangkan dan difasilitasi lebih lanjut, sehingga kelompok usaha yang telah mendapat pelatihan keterampilan bertani dan kerajinan mampu memasarkan hasil usahanya.

Kata kunci: Ajaran Sosial Gereja; Martabat Manusia; Citra Allah

Abstract

*Many kinds of policy and program should be deeply rooted in our belief to God and for people prosperity themselves. Empowerment which is involve worship is meaningful if it is directed to human prosperity as God creature which is him alike. Church social doctrine which is printed in encyclical emphasize that the process of empowerment does not make them having attitude of dependency to power of a big scale economic or government, but escape them from dependency. There for encyclical contains that PSE commission should develop people skill and potential so that they are able to create independent economic business, and PSE commission should control public policy direction in economic or politics in order to strengthen public prosperity (*bonum commune*). PSE commission should be able to push public policy creator and doer to work honestly, fair, and concern about common interest. Creating network marketing and business micro which train and creating work place for who are not skillful enough. This action should be developed and facilitated further, so that group business which have got skill training about farming and craft are able to market business result.*

Key words: Church Social Teaching; Human Dignity; Image of God

PENDAHULUAN

Ajaran Sosial Gereja (ASG) merupakan sebuah pedoman untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan manusia (politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan). Ajaran Sosial Gereja, dengan segala aspeknya, memberikan pendampingan kepada manusia dalam upaya mereka mencari solusi untuk berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan social (Hartadawiryana, 1999).

Rerum Novarum (RN) merupakan ensiklik dengan fokus keprihatinannya pada kondisi kerja pada masa itu khususnya nasib para buruh. Empat puluh tahun sesudah terbitnya *Rerum Novarum*, Paus Pius XI mengeluarkan Ensiklik *Quadragesimo Anno* (QA). QA tidak berpusat pada masalah buruh, melainkan tentang pemulihan dan penyempurnaan sebuah masyarakat sesuai dengan rencana keselamatan Allah.

Ensiklik *Mater et Magistra* dilahirkan sebagai tanggapan kekhawatiran ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia, di mana kesenjangan kemiskinan tidak hanya terjadi antara pengusaha dan pekerja atau antara pemilik modal dan buruh, tetapi sudah merambah ke dalam dimensi internasional.

Konsili Vatikan II menjadi momen penting dalam pembaharuan menyeluruh Gereja Katolik. Dokumen *Gaudium et Spes* (selanjutnya disingkat GS) secara menyeluruh memperhatikan hubungan antara Gereja dan dunia modern. GS mengangkat berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam konteks perkembangan dunia modern (K. V. II, 1993).

Populorum Progressio (PP) adalah sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paus Paulus VI mengenai kemajuan bangsa-bangsa dan pentingnya agar ekonomi dunia melayani seluruh umat manusia. Ensiklik ini dirilis pada tanggal 26 Maret 1967 (VI, 1994).

Selanjutnya *Sollicitudo Rei Socialis* adalah sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 Desember 1987, dalam rangka perayaan 20 tahun *Populorum Progressio* (P. Y. Paulus II, 2011). Ensiklik ini membahas perbedaan antara kemajuan dan pembangunan.

Centesimus Annus (CA), mengikuti skema pemikiran dokumen-dokumen sebelumnya, dengan memulai pembahasan tentang *Rerum Novarum* yang diperingati (Y. P. II, 1991). Selain itu, *Centesimus Annus* juga menghadapi isu-isu lingkungan hidup yang menjadi masalah penting pada saat itu. Penelitian ini memperhatikan mengenai bagaimana ajaran sosial Gereja berkontribusi dalam membangun martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam pengelolaan penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode kepustakaan. Menurut Parwoko, penelitian kepustakaan adalah pendekatan yang melibatkan pencarian data dan informasi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah. Teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan dan berbagai laporan sesuai dengan masalah yang dikaji. Sumber-sumber tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan temuan (Parwoko, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Ajaran Sosial Gereja

Prinsip-prinsip ajaran sosial Gereja merupakan intipati Ajaran Sosial Gereja. Prinsip-prinsip tersebut adalah martabat pribadi manusia, kesejahteraan umum, subsidiaritas dan solidaritas. Prinsip-prinsip ini bercorak umum dan fundamental karena berhubungan dengan realitas masyarakat dalam keseluruhan aspek kehidupan mereka.

Martabat Manusia

Pemahaman Gereja tentang martabat manusia berasal dari Kitab Kejadian 1:27, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga dianggap sebagai citra Allah. Fakta bahwa setiap orang adalah citra Allah yang memiliki beberapa konsekuensi penting.

Pertama, setiap orang memiliki martabat yang sama, yang berasal dari kecitraannya dengan Allah. Martabat manusia sama sekali bukan hasil kerja, usaha, dan prestasinya sendiri melainkan anugerah Allah. *Kedua*, karena diciptakan seturut citra Allah, maka seluruh tatanan masyarakat serta kemajuannya harus menunjang kesejahteraan pribadi manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, manusia harus menjadi tujuan, bukan alat (Florison, 2009).

Akibat ketiga dari hal ini adalah manusia memiliki dimensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Manusia tidak ada dalam isolasi; secara mendasar, manusia adalah makhluk sosial yang bergantung erat pada orang lain. Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern, *Gaudium et Spes*, dengan jelas menyatakan hal ini: "Harmoni dalam kehidupan manusia adalah bentuk pertama komunitas antarindividu. Dimensi sosial dalam manusia bukanlah hal yang sekunder; ini adalah bagian integral dari esensinya (R. Hardawiryana, 1993). Dimensi sosial ini menjadi dasar yang kokoh bagi prinsip-prinsip Ajaran Sosial Gereja tentang kesejahteraan umum dan solidaritas (Florison, 2009).

Kesejahteraan Bersama

Kesejahteraan umum, yang juga dikenal sebagai *bonum commune*, adalah konsep inti dalam Ajaran Sosial Gereja, yang mengacu pada kondisi sosial secara keseluruhan yang memfasilitasi dan mendukung manusia dalam mencapai perkembangan pribadinya secara optimal (Florison, 2009). Paus Paulus VI, dalam Ensiklik *Populorum Progressio*, menyatakan bahwa sesuai dengan rencana Allah, setiap individu dipanggil untuk mengembangkan dirinya dengan menggunakan kecerdasan dan kebebasannya yang dianugerahkan.

Kesejahteraan umum tidak hanya berarti mencapai kesejahteraan materi, seperti memiliki berbagai fasilitas atau barang tertentu. Kesejahteraan ini melibatkan penciptaan kondisi di mana setiap individu dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Ajaran Sosial Gereja secara prinsip mengaitkan ide kesejahteraan umum dengan peran negara dan lembaga publik.

Prinsip Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas adalah prinsip yang menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas sosial yang lebih tinggi dan menuntut agar otoritas yang sama membantu individu dan kelompok yang lebih kecil dalam memenuhi kebutuhan mereka, sejauh diperlukan. Hal ini karena masyarakat yang sehat memerlukan anggota yang aktif dan kreatif, yang tidak sepenuhnya bergantung pada pihak yang lebih tinggi. Ensiklik *Quadragesimo Anno* menegaskan bahwa apa pun yang dapat dilakukan oleh individu dengan inisiatif dan usaha sendiri, tidak boleh diambil darinya dan diberikan kepada masyarakat.

Dalam penerapannya, prinsip ini tidak boleh dicampuradukkan dengan memberi subsidi. Maka prinsip ini menentang segala bentuk sentralisme yang berlebihan dan di lain pihak menuntut agar lembaga-lembaga yang lebih tinggi dan lebih mampu memberikan bantuan dan dorongan seperlunya kepada golongan yang lebih kecil dan lemah sehingga mereka boleh mengembangkan diri mereka.

Prinsip Solidaritas

Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (SRS), Paus Yohanes Paulus II menyebut solidaritas sebagai keutamaan asli dalam kehidupan sosial. Solidaritas bukanlah sekadar

perasaan simpati yang samar atau kesedihan dangkal terhadap penderitaan banyak orang. Sebaliknya, solidaritas merupakan tekad hati yang kuat dan berkelanjutan untuk berkomitmen pada kesejahteraan bersama, yaitu kebaikan semua orang dan setiap individu.

Solidaritas tidak hanya dituntut dari mereka yang kaya, kuat, dan berlebihan fasilitas. Mereka yang lemah dan miskin tidak menjadi sekedar "sasaran" solidaritas dari mereka yang kaya. Perlu diingat bahwa walaupun merupakan perwujudan dari dimensi sosial dan sifat saling bergantung manusia, solidaritas tidak ditujukan kepada manusia. Solidaritas harus terarah kepada kesejahteraan umum.

Unsur-Unsur Baru Dalam Ajaran Sosial Gereja Bidang Pastoral Praktis

Ensiklik Yohanes Paulus XXIII, *Mater et Magistra* maupun Konstitusi Dogmatis *Gaudium et Spes* sedapat mungkin tidak menekankan aspek sistematis atau garis-garis prinsipil guna menyusun tata tertib sosial ekonomis, melainkan apa yang perlu dibuat agar martabat manusia dan kehendak Sang Pencipta dihormati secara lebih jelas.

Sikap dan keyakinan Gereja yang demikian merupakan sesuatu yang wajib dilakukan Gereja sekarang karena sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan umat sekarang ini. Akibat yang tidak dapat dihindari adalah seruan-seruan dan norma-norma ini mungkin juga agak terbatas pada zaman dan daerah tertentu seperti buruh tani.

Segi Keahlian Dalam Bidang yang Khusus

Dalam mengamalkan prinsip-prinsip ASG, Ensiklik *Mater et Magistra* menekankan tiga tahap berhubungan dengan hal ini yakni *pertama*, mengamati situasi konkret. *Kedua*, menilai keadaan atau situasi tersebut dalam terang Ajaran Sosial Gereja. *Ketiga*, memutuskan apa yang dapat dan wajib dilakukan dalam keadaan yang konkret untuk merealisasikan prinsip-prinsip ASG.

Para awam Katolik diminta, supaya mereka berusaha mendapatkan fakta-fakta yang tepat dan lengkap dan atas dasar ini merencanakan serta melaksanakan perbaikan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Gereja mengajarkan agar kemajuan dan kemakmuran harus dinilai sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai jalan bagi manusia untuk mencapai tujuannya dengan lebih baik.

Ajaran yang Terus Berkembang

Suatu ajaran sosial selalu berhubungan dengan masyarakat yang hidup dalam dunia yang terus menerus berkembang. Sifat ini adalah sifat keadilan sosial yang mempunyai peranan utama untuk mengatur pola ekonomi dan kehidupan masyarakat terus menerus. Hal ini terungkap dalam beberapa pandangan Ajaran Sosial Gereja.

Pertama, tentang prinsip kesamaan semua manusia. Hal ini secara jelas digambarkan dalam Ensiklik *Pacem in Terris*. Ajaran ini kemudian menjadi dasar bagi seluruh Konstitusi *Gaudium et Spes* dimana di dalamnya ditegaskan kewajiban semua orang untuk memandang setiap sesama manusia tanpa kecuali sebagai Aku yang lain, dengan pertama-tama memperhatikan kebutuhan untuk hidup dengan layak.

Dalam *Gaudium et Spes* ditandaskan bahwa setiap orang harus berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dalam perjuangan untuk membangun kerjasama demi kepentingan masyarakat umum dengan cara yang layak bagi manusia. Untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan keadilan dan kesamaan, orang harus bekerja keras, agar keadaan ekonomi yang sekarang tidak seimbang dan semakin pincang secepat mungkin diubah. Kesadaran akan martabat yang luhur ini mendorong Gereja untuk terus terlibat aktif dalam melakukan berbagai program pengembangan kehidupan umat dalam berbagai bidang kehidupan (K. V. II, 1993).

Kedua, pola pemerintah dan peranan negara. Sangatlah sesuai dengan martabat manusia jika negara mampu mengembangkan sebuah pola iuridis-politis yang memberikan kebebasan kepada semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun.

Usaha Memajukan Manusia Seutuhnya Gereja dan Bangsa-Bangsa yang Sedang Berkembang

Realitas perkembangan bangsa-bangsa yang sedang berkembang mendapat tempat yang begitu penting dalam ASG karena Gereja hidup dalam sejarah. Gereja menyatukan diri dengan cita-cita luhur umat manusia.

Hal ini ditegaskan lebih mendalam dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja Dalam Dunia Moderen, *Gaudium et Spes*: Hendaknya bangsa-bangsa yang sedang berkembang mengusahakan penyempurnaan hidup manusiawi warganya. Hal inilah yang harus menjadi tujuan yang jelas dan tetap dari kemajuan.

Gereja sama sekali tidak memperkecil peranan pembangunan ekonomis. Ini mutlak perlu. Kerja keras adalah perintah Allah. Akan tetapi tujuan-tujuan ekonomis maupun politik tidak boleh dikejar dengan merendahkan martabat manusia.

Perikemanusiaan

Humanisme universal sebagai dasar dan tujuan pembangunan suatu masyarakat yang lebih manusiawi mengandung lima unsur penting. Pertama, humanisme yang terbatas atau tertutup terhadap nilai-nilai spiritual dan asal-usul ilahinya hanya akan mencapai hasil yang dangkal atau palsu saja. Kemanusiaan yang terkungkung sama dengan kemanusiaan yang anti manusiawi.

Kedua, perkembangan sejati harus bersifat menyeluruh. Gereja sangat menghargai manusia. *Ketiga*, kemajuan hanya akan membawa hasil, kalau semua warga bekerja sama dalam solidaritas atau persaudaraan yang menjadi nyata. *Keempat*, hasil dari perkembangan ini tidak lain dari penyempurnaan diri sebagai manusia. *Kelima*, seorang Kristen tidak boleh tidak memiliki unsur yang memperlihatkan bahwa kemanusiaan sejati akhirnya berakar dalam manusia yang sekaligus adalah Sabda Allah.

Gereja dan Kesadaran Baru Nilai Etis

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi cara berpikir manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dalam situasi demikian, Gereja mempunyai tugas khusus yaitu ikut membangun kesadaran akan nilai-nilai etis, untuk menyusun suatu masyarakat yang bukan hanya berbeda tetapi terutama adalah masyarakat yang lebih manusiawi.

Kesadaran ini akan mengarahkan manusia kepada penyempurnaan manusia seluruhnya. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai etis mewajibkan Gereja untuk menanamkannya dalam diri setiap pribadi manusia termasuk para generasi muda yang kelak akan menjadi subyek-subyek pembangunan Gereja dan bangsa. Hanya dengan bertindak demikian umat Kristen akan dapat merupakan "jiwa masyarakat" atau "garam dunia" (Heuken, 1973).

SIMPULAN

Perhatian dan keterlibatan Gereja terhadap kehidupan umat manusia di dunia ini didasarkan pada iman dan kepercayaan kepada Allah yang sudah dan sungguh terlibat dalam sejarah kehidupan umat-Nya. Perhatian dan keterlibatan Allah ada sejak kisah penciptaan, peristiwa pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir dan berpuncak dalam diri Putera-Nya Yesus Kristus. Gereja Lokal dalam berbagai program pemberdayaannya terhadap kehidupan sosial ekonomi umat didasarkan pada solidaritas Allah dengan umat-Nya. Oleh karena itu setiap program pemberdayaan yang dijalankan harus mampu menjaga

martabat manusia sebagai citra Allah dan membebaskan manusia dari berbagai situasi ketidakadilan dan penindasan.

Setiap umat Kristen dipanggil untuk membangun kesejahteraan bersama dengan membentuk sikap dan perilaku yang ekonomis, menciptakan tempat-tempat kerja baru yang bisa memberikan upah yang layak dan aktif mengambil bagian dalam proyek-proyek yang pengadaan dan meningkatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Seluruh keterlibatan Gereja akan terlaksana dengan baik apabila ia berakar dalam solidaritas Allah dengan seluruh umat manusia dalam Yesus Kristus.

DAFTAR PUSTAKA

- Florison, Y. M. (2009). *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Ledalero.
- Hartadawiryana, R. (1999). *Kumpulan Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Heuken, A. (1973). *Cukup Sosialkah Gereja? Ajaran Sosial Gereja Menghadapi Masalah-Masalah Aktual*. Sekretariat Nasional KM/CLC.
- II, K. V. (1993). *Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern Gaudium et Spes*. Obor.
- II, P. Y. paulus. (2011). *Keluarga kristiani dalam dunia modern*.
- II, Y. P. (1991). *Centesimus Annus , Ulang Tahaun ke Seratus*. Departemen Dokumen dan Penerangan KWI.
- Parwoko, T. M. dan B. (2017). *Studi Kepustakaan. BK Unnesa, 1*.
- R. Hardawiryana. (1993). *Dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes (p. 92)*. Obor.
- VI, P. (1994). *Popularum Progressio-Perkembangan Bangsa Bangsa (Pen) R. Hardawiryana*. Departemen Dokumen dan Penerangan KWI.